

## **BAB III**

### **KONFLIK DARFUR DAN PENAHAPAN KONFLIK**

Bab III memuat penjelasan mengenai proses eskalasi konflik Darfur dari tahun 2003-2010. Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran konflik yang terjadi di Sudan termasuk konflik yang terjadi di Sudan Selatan dan konflik yang pernah terjadi di Sudan Timur, kemudian menjelaskan konflik yang terjadi di Darfur serta penahapan konflik tersebut.

#### **A. Dinamika Konflik di Sudan**

Munculnya beberapa konflik di wilayah Sudan dapat mengganggu rasa persatuan masyarakat Sudan. Konflik disatu daerah dapat memicu terjadinya konflik di daerah lain dan bahkan dapat memperbesar konflik di daerah lain yang telah ada. Konflik horizontal melawan pemerintah telah bermunculan di kawasan Sudan. Apabila konflik-konflik yang telah ada tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan memunculkan konflik-konflik internal lain yang pada akhirnya akan mengganggu rasa kebangsaan masyarakat Sudan. Oleh karenanya Pemerintah Sudan harus segera menyelesaikan gejolak sosial tersebut demi menghindari pemecahan masyarakat Sudan yang lebih besar lagi

Sudan merupakan negara multi-etnis dan multi-agama yang memiliki ketimpangan kelas sosial, ekonomi dan politik antara etnis Afrika Arab dan Afrika Hitam. Sejak meraih kemerdekaannya pada 1 Januari 1956, Sudan telah dilanda berbagai macam krisis. Sudan pernah diembargo Amerika Serikat karena dituduh menyembunyikan teroris Osama bin Laden pada 1993 yang mengakibatkan perekonomian Sudan kian memburuk. Selain itu krisis identitas nasional setelah diterapkannya syariat Islam di Sudan, ditambah tuduhan dominasi etnis Afrika Arab atas Afrika Hitam dalam hampir segala aspek kehidupan masyarakat Sudan kian memperparah kondisi yang ada.

Hal tersebut menyebabkan pertikaian kian membesar yang berakhir dengan perang saudara antara penduduk Sudan. Korban sipil atas pertikaian tersebut tidak sedikit jumlahnya dan kian bertambah waktu demi waktu. Krisis multidimensi di Sudan menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan yang memunculkan pergolakan menentang pemerintah di beberapa kawasan Sudan seperti di Sudan Selatan, Sudan Timur maupun kawasan Darfur di Sudan Barat.

### **1. Konflik Sudan Selatan**

Konflik yang berawal dari perbedaan etnis dan agama berlanjut ke alasan kesenjangan pembangunan menjadi pemicu konflik di Sudan Selatan. Pemerintah pusat Sudan yang mayoritas beretnis Afrika Arab dan beragama Islam dianggap lebih mendominasi berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Sudan Selatan yang beretnis Afrika Hitam dan beragama Kristen.

Konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara yang berawal pada tahun 1955, kemudian berhasil diakhiri pertama kali pada tahun 1972 dengan menghasilkan *Addis Ababa Peace Agreement*. Kesepakatan damai tersebut berisi pemberlakuan otonomi daerah dan melakukan percepatan budaya dan ekonomi. Namun pada tahun 1983 Presiden Jafar Numayri menerapkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh Sudan yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan kembali antara wilayah Utara dan Selatan. Ketegangan terjadi antara kelompok *Sudan People Liberation Army (SPLA)* yang dipimpin oleh John Garang dengan Pemerintah Khartoum.<sup>44</sup>

Konflik makin meruncing setelah ditemukannya cadangan minyak yang melimpah di Selatan yang menyebabkan masyarakat Utara semakin berambisi untuk bersikap dominan terhadap Selatan. Padahal penemuan minyak yang ada di Selatan sebesar 70%<sup>45</sup> dari cadangan minyak Sudan menjadi harapan baru akan pertumbuhan ekonomi Selatan. Hal tersebut semakin mengkokohkan pihak Utara untuk mempertahankan status kuasa otonomi terhadap Selatan.

Akibat konflik yang terus berlangsung menyebabkan korban semakin banyak berjatuhan. Sebanyak lebih dari 2 juta orang meninggal dunia, 4 juta orang kehilangan tempat tinggal dan 600.000 orang menjadi pengungsi di negara lain. Usaha untuk menciptakan perdamaian juga diupayakan oleh negara-negara tetangga, negara donor dan kelompok-kelompok yang berkonflik itu sendiri. Upaya perdamaian dimulai tahun 1993 yang diinisiasi oleh negara-negara Afrika

---

<sup>44</sup> *Konflik Darfur Tidak Bersi AS*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/07/0803.htm>, diakses 17

dengan bantuan *Inter Governmental Authority on Develepment* (IGAD) yang diikuti dan didukung oleh PBB. Pada tanggal 20 Juli 2002 di Machakos, Kenya, Pemerintah Sudan dan SPLM mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya perjanjian yang merupakan kerangka dasar perjanjian selanjutnya atau yang dikenal dengan *Machakos Protocol*.

Untuk meningkatkan upaya-upaya perdamaian dan kemajuan yang telah dicapai, maka Dewan Keamanan PBB atas rekomendasi Sekjen PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1774 tanggal 11 Juni 2004 dengan menetapkan Misi Khusus Politik (*Special Political Mission*) *the United Nations Advance Mission in Sudan* (UNAMIS). UNAMIS ditugasi untuk memfasilitasi hubungan kerjasama antara Pemerintah Sudan dan SPLM serta mempersiapkan langkah-langkah pengenalan operasi untuk mendukung perdamaian.

Pada tanggal 9 Januari 2005 Pemerintah Sudan diwakili oleh Wakil Presiden Ali Osman Taha dan SPLM/A diwakili oleh John Garang menandatangani *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) di Nairobi, Kenya.<sup>46</sup> CPA ini mengesahkan *Machakos Protocol* dan masalah-masalah yang belum diselesaikan dalam *Machakos Protocol* diantaranya pembagian kekuasaan dengan pemerintahan pusat, otonomi daerah Selatan, dan pembagian sumber-sumber ekonomi yang lebih merata termasuk minyak. Impelementasi dari CPA tersebut adalah :

---

<sup>46</sup> *Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia,*

<http://www.kemiripolisiindonesia.com/mis/pbr?page=ragam&id=200> diakses 18 januari

- a. Pembagian kekuasaan (*power sharing*), dimana struktur pemerintahan Republik Sudan terdiri dari Presiden Omar Bashir, Wakil Presiden Pertama Salva Kiir Maryadit (mewakili wilayah Selatan) dan Wakil Presiden Kedua Ali Osmā Taha (mewakili wilayah Utara) dan para Menteri yang terdiri dari perwakilan wilayah Utara dan Selatan.
- b. Pemberian Otonomi Khusus kepada Sudan Selatan, yang terdiri dari 10 propinsi. Wilayah Sudan Selatan ini dipimpin oleh Presiden Sudan Selatan yang juga merupakan Wakil Presiden Pertama Sudan.
- c. Implementasi dari penentuan nasib sendiri adalah wilayah Sudan Selatan akan melaksanakan referendum pada tanggal 9 Januari 2011, untuk menentukan apakah Sudan Selatan akan tetap berada dalam satu Republik Sudan atau akan memisahkan diri dari Republik Sudan.

Isi perdamaian tersebut menjadikan enam tahun masa transisi bagi Sudan Selatan untuk persiapan referendum. Selain itu pada periode ini hasil dari eksplorasi minyak di Sudan Selatan dibagi dua masing-masing mendapat lima puluh persen (50%). Penandatanganan perjanjian ini mendapat sambutan positif rakyat Sudan terutama dari kalangan penduduk di wilayah Sudan Selatan maupun masyarakat regional Afrika dan internasional. Konflik yang bersifat primordial hanya mengancam kehidupan bersama bangsa Sudan yang bersifat majemuk. Gerakan separatis di wilayah Selatan telah mengganggu konsentrasi atas proses pembangunan sosial, ekonomi dan kehidupan politik bangsa secara keseluruhan.

## 2. Konflik Sudan Timur

Pada awal tahun 2005 muncul kelompok pemberontak di Sudan Timur dengan melakukan aksi kekerasan dalam memperjuangkan tuntutannya. Kelompok tersebut yaitu *Beja Conference* dan *Rashaida Free Lions* yang memprotes Pemerintah Sudan yang dianggap kurang membangun kawasan tersebut. Pemerintah Sudan khawatir kedua kelompok tersebut akan mengangkat masalah-masalah dalam negeri ketingkat regional atau internasional sebagaimana yang terjadi di Darfur sehingga dapat mempersulit upaya perwujudan perdamaian menyeluruh yang sedang dirintis.<sup>47</sup>

Suku Beja merupakan salah satu suku Afrika Hitam yang berdomisili di Sudan Timur yang tersebar di negara bagian Red Sea, Port Sudan, Kassala serta di perbatasan timur antara Sudan dan Eritrea.<sup>48</sup> Sejak pemerintahan Al-Inqaz pada 1989 suku ini sudah membentuk sebuah fraksi oposisi yang dinamakan *Beja Conference* dan bersama-sama dengan kelompok bersenjata *Rashaida Free Lions*<sup>49</sup> yang dibentuk pada tahun 1999 oleh Mubarouk Mubarak Salim, bergabung dalam kelompok partai oposisi *National Democratic Alliance* (NDA) melawan Pemerintah Khartoum.

Masalah Sudan Timur mulai mengemuka sejak hubungan antara Sudan dan Eritrea memburuk pada Oktober 2001. Diperkirakan suku Beja yang berdomisili di Eritrea juga merupakan pasukan NDA yang didukung Eritrea,

---

<sup>47</sup> *Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SUDAN TIMUR DLL.doc* (tersedia dari Direktorat Timur Tengah, Departemen Luar Negeri RI) hal.1

<sup>48</sup> *Beja People*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Beja\\_people](http://en.wikipedia.org/wiki/Beja_people), diakses 18 Januari 2011

<sup>49</sup> *Rashaida Free Lions*, [http://www.egypt.com/rahi/Rashaida\\_Free\\_Lions](http://www.egypt.com/rahi/Rashaida_Free_Lions), diakses 18 Januari

dimana ikut berperan dalam penyerbuan kota Kassala pada Oktober 2001. Ketika masalah Darfur muncul kepermukaan pada Februari 2003, suku Beja mulai mengangkat isu-isu persamaan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Namun karena kelompok ini berada dibawah payung NDA maka aspirasinya tertahan oleh kebijakan kelompok NDA.

Pada 15 Januari 2005 di Kairo, Mesir tercapai kesepakatan politik antara kelompok oposisi NDA dengan Pemerintah Sudan. Melihat kesepakatan tersebut *Beja Conference* menganggap bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan masalah perdamaian. Maka pada 28 Januari 2005 sekitar 100 penduduk suku Beja di Port Sudan dan negara bagian Red Sea di Sudan Timur melakukan unjuk rasa yang mengakibatkan 18 orang meninggal dan 35 orang luka-luka karena bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut pengadaan lapangan kerja, keterlibatan suku Beja dalam pemerintahan serta pemerataan hasil-hasil kekayaan negara.<sup>50</sup>

Sekjen *Beja Conference*, Fatima Dirar menilai peristiwa tersebut sebagai pembangkangan oleh kelompok suku Beja dan menghimbau jajarannya agar berdialog. Fatimah menilai adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memojokan suku Beja. Sementara itu, ketua NDA Osman Mirghani dari Kairo, Mesir membentuk sebuah komite yang diketuai oleh Al Tigani El Tayyib, Farouk Abo Issa dan Mohamed Hashim untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh *Beja Conference* yang juga merupakan salah satu faksi dalam NDA.

---

<sup>50</sup> G. J. p. III 2006/5. L. 2006/2. G/S. L. Beja. J. (terjemah dari Direktorat Timur Tengah

Unjuk rasa tersebut telah mengejutkan Pemerintah Khartoum yang sedang sibuk mengatur pelaksanaan persetujuan damai antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak SPLA di Sudan Selatan. Wapres I Ali Osman Taha menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut karena kesepakatan damai yang telah ditandatangani Pemerintah dengan SPLA telah memberikan peluang bagi semua pihak oposisi diseluruh Sudan agar mendukung dan mengakselerasi perdamaian. Pemerintah akan menuntaskan masalah tersebut karena tidak ada alasan untuk menempuh cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan tuntutan.

Kelompok pemberontak Sudan Timur ini ditenggarai mendapat dukungan dari Eritrea sehingga menyulitkan Pemerintah Sudan untuk menghentikan gerakannya. Oleh karena itu tokoh-tokoh di negara bagian timur Sudan yang mendapat dukungan pemerintah Khartoum mulai menggagas rekonsiliasi agar konflik tersebut tidak membesar dan dapat diselesaikan secepatnya. Hingga akhirnya pada Oktober 2006 berhasil ditandatangani kesepakatan damai antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak Sudan Timur.<sup>51</sup> *Beja Conference* dan *Rashaida Free Lions* menerima baik kesepakatan yang dicapai tanpa adanya intervensi asing dimana kelompok pemberontak tersebut mendapat kursi dalam pemerintahan Sudan dan Pemerintah segera mengupayakan perbaikan pembangunan di kawasan Sudan Timur.

---

<sup>51</sup> Leah Fisher, *East Africa's rebel leaders press deal*, <http://www.bbc.co.uk/2/hi/africa/6052156.stm>



## **B. Dinamika Konflik Darfur**

Marginalisasi ekonomi dan politik antara pemerintahan pusat dengan daerah serta perebutan wilayah pertanian mendorong lahirnya pemberontak di kawasan Darfur, Sudan bagian barat. Konflik awalnya terjadi antara suku Afrika Hitam dan suku Afrika Arab yang memperebutkan wilayah pertanian dan sumber air di kawasan Darfur. Namun akhirnya konflik tersebut makin meluas dengan mengikutsertakan Pemerintah Sudan yang mempersenjatai suku Afrika Arab yang bernama Janjaweed. Maka perang saudara di tanah Fur tersebut kian membesar dan memanas yang mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa.

Melihat situasi tersebut maka organisasi sekawasan yaitu Uni Afrika, mulai turut andil dalam upaya pencapaian perdamaian di kawasan Darfur. Berbagai perundingan damai terus diupayakan, namun kerap mengalami kegagalan karena kurangnya tekad dan kemauan dari para pihak yang berkonflik. Hingga akhirnya masyarakat internasional mulai berperan dalam upaya perdamaian di Darfur demi menjaga perdamaian dunia. Hingga akhirnya pada 2006 berhasil ditandatangani perjanjian damai *Darfur Peace Agreement* (DPA). Namun rupanya DPA tersebut tidak mampu bertahan lama karena mulai terjadi lagi gencatan senjata antara kedua belah pihak yaitu antara Pemberontak Darfur dan Pemerintah Sudan. Meski demikian usaha menciptakan perdamaian dan

menyediakan bantuan kemanusiaan terus dilanjutkan di kawasan Darfur

## 1. Masa Sebelum *Darfur Peace Agreement (DPA)*

Serangan terhadap Bandar Udara El Fasher di Darfur Utara pada tanggal 26 Februari 2003 menjadi titik awal perang antara kelompok pemberontak Darfur dengan Pemerintah Sudan yang didukung oleh milisi Arab Janjaweed. Para pemberontak Darfur juga melakukan penyerangan terhadap markas pemerintah di kota Golo, menyerang pos-pos polisi dan konvoi-konvoi militer milik pemerintah di Pegunungan Marra. Pada 25 Maret 2003 markas militer milik pemerintah di kota Tine yang terletak di perbatasan Chad berhasil direbut.

Untuk melawan gerakan pemberontakan, Pemerintah Sudan menambah pasukan tentara dan mendukung penduduk lokal untuk membentuk suatu kelompok yang dikenal sebagai Janjaweed atau iblis berkuda. Anggotanya sebagian besar adalah orang-orang Afrika Arab yang mayoritas adalah peternak. Pemerintah yang mendukung Janjaweed menuduh penduduk Non-Arab (Afrika Hitam) melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan massal, perampokan dan pemerkosaan di Darfur.

Pemberontak Darfur ini dimotori oleh *Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A)* dibawah pimpinan Abdul Wahid dan *Justice and Equality Movement (JEM)* dibawah pimpinan Khalil Ibrahim. Kelompok ini terdiri dari petani agraris yang kebanyakan adalah orang muslim Afrika Hitam. Anggota SLM adalah orang-orang Fur, Masalit serta suku Wagi Zaghawa; sedangkan anggota JEM adalah orang-orang dari suku Koba Zaghawa. Mereka menuntut

penghentian kekejaman yang dilakukan oleh milisi Arab Janjaweed terhadap penduduk etnis Afrika Hitam serta marginalisasi politik dan ekonomi di Darfur.

Penyerangan oleh Janjaweed yang sering mendapat bantuan langsung dari pemerintah Sudan telah menyebabkan sepuluh ribu kematian di Darfur dan lebih dari dua juta pengungsi yang mengungsi ke negara tetangga, Chad. Banyak anak-anak Darfur meskipun tinggal di kamp-kamp pengungsi mengalami kekurangan gizi dan kelaparan hingga mati. Hal itulah yang membuat dunia internasional melihat bahwa konflik Darfur bukan lagi konflik domestik melainkan konflik internasional apabila penyelesaiannya tidak segera diupayakan, karena dapat memicu timbulnya konflik-konflik lain dikawasan sekitarnya.

Menurut catatan PBB konflik Darfur telah memakan korban 300.000 orang meninggal dunia dan 2,7 juta orang kehilangan tempat tinggal. Namun jumlah ini dengan tegas ditolak Pemerintah Sudan dengan menyatakan korban meninggal hanya 10.000 orang. Kondisi ini memaksa komunitas regional maupun internasional ikut campur tangan dalam penyelesaian konflik ini. Apabila tidak ada campur tangan pihak ketiga maka konflik akan terus terjadi dan korban baik jiwa maupun materiil akan terus bertambah, serta kehidupan rakyat Darfur akan semakin sengsara.

Pada tahun 2004 Uni Afrika atau *African Union* (UA) menggelar misi pemeliharaan perdamaian dengan nama AMIS (*African Mission In Sudan*). AMIS disahkan berdirinya pada tanggal 25 Mei 2004 dengan menggelar pasukan perdamaian yang terdiri dari 6.171 personel militer dan 1.660 personel polisi. Di

samping menggelar pasukan untuk mencegah kondisi Darfur yang lebih buruk lagi, upaya-upaya penyelesaian konflik secara politis antara Pemerintah Sudan dan Pemberontak Darfur yang diprakarsai oleh Uni Afrika terus dilakukan.<sup>52</sup>

Namun rupanya hal itu belum mampu meredam konflik di Darfur. Pada tanggal 31 Juli 2004 sidang Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) memutuskan resolusi yang memberikan tenggang waktu 30 hari kepada Pemerintah Sudan untuk melucuti senjata milisi Janjawed dan menciptakan stabilitas keamanan. Pertemuan tersebut telah mengesahkan draft resolusi usulan Amerika Serikat (AS) dan Inggris sebagai resolusi 1556 (2004) dengan didukung 13 negara. Resolusi 1556 disahkan atas dasar pertimbangan Bab VII dari piagam PBB, yang mengategorikan situasi di Sudan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta kestabilan kawasan.<sup>53</sup>

Sudan akhirnya setuju pada tekanan internasional untuk mengakhiri konflik wilayah Darfur. Sudan setuju untuk menghentikan penerbangan militer diatas kawasan tersebut dan menandatangani dua kesepakatan perdamaian dengan pihak pemberontak. Setelah dua pekan perundingan di ibukota Nigeria, Abuja, Pemerintah Sudan mencabut keberatannya pada zona larangan terbang dan menandatangani perjanjian dengan pihak pemberontak meliputi keamanan dan akses bagi bantuan ke Darfur.

---

<sup>52</sup> *Partisipasi Polri Dalam Menjaga Perdamaian Dunia*,  
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ragam&id=200&halaman=5>, diakses 29 November 2010

<sup>53</sup> *Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc* (tersedia dari Direktorat Timur Tengah, Departemen Luar Negeri RI) hal 2

Pada tanggal 10 November 2004, Pemerintah Sudan dan Pemberontak Darfur menandatangani dua kesepakatan yaitu “Protokol Kemanusiaan” dan “Protokol Keamanan” di Abuja pada perundingan perdamaian yang dipimpin Uni Afrika. Namun pada akhir bulan November 2004, Pemerintah Sudan memberlakukan keadaan darurat di sebagian wilayah Darfur setelah pemberontak melancarkan serangan yang menewaskan 21 polisi dan warga sipil.<sup>54</sup>

Uni Afrika telah mengirimkan 1700 tentara pemelihara perdamaian ke Darfur untuk membantu penyelesaian konflik yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar menurut catatan PBB. Krisis ini dicap sebagai pembasmian etnik/ genosida oleh Amerika. Sementara Pemerintah Sudan membantah adanya pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) dalam konflik yang terjadi tersebut.

Tanggal 31 Januari 2005 *United Nation Fact Finding Mission (UNFFM) on Darfur* menyampaikan laporan investigasi tentang tuduhan pelanggaran HAM/ genosida. Laporan tersebut menuduh pasukan Pemerintah dan milisi Arab melakukan penyiksaan, penculikan, perampokan, pemerkosaan dan mengusir para penduduk dari tempat tinggal mereka. UNFFM juga mengindikasikan tindakan kriminal juga dilakukan oleh pemberontak SLM dan JEM.<sup>55</sup> Pemerintah Sudan menilai laporan tersebut tidak netral karena laporan tersebut hanya menyoroti sisi negatif pemerintah dan sebaliknya tidak menyebut pelanggaran-pelanggaran oleh kelompok pemberontak (SLM dan JEM) yang juga banyak melakukan aksi

---

<sup>54</sup>Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc, op.cit., hal.3

<sup>55</sup>

kriminal. Selain itu UNFFM tidak menyebut 51 nama dan posisi pejabat-pejabat pemerintah yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM agar tidak melarikan diri dan sembunyi ke luar negeri. Sebagai negara yang berdaulat, Sudan mampu untuk mengadili pejabat-pejabatnya yang terlibat dalam pelanggaran HAM karena itu Pemerintah Sudan menolak warganya untuk diadili di luar negeri.

Sekjen PBB menghimbau agar DK-PBB segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM di Darfur dan menyerahkan masalah tersebut kepada Mahkamah Internasional atau *Internasional Criminal Court* (ICC). Sekjen PBB juga meminta Rusia dan China yang selama ini sikapnya terhadap masalah Darfur tidak menguntungkan posisi negara-negara Barat seperti Inggris, Perancis supaya mengakhiri perbedaan pendapat antara sesama anggota guna menyelesaikan masalah Darfur.

Pada KTT Mini tanggal 16 Februari 2005<sup>56</sup> yang di hadiri oleh Presiden Chad, Congo, Mali serta wakil negara Mesir dan Libya, Pemerintah Sudan menolak campur tangan asing dalam penyelesaian masalah Darfur dan menginginkan agar masalah Darfur dimediasi oleh Uni Afrika serta menentang kehadiran pasukan multinasional PBB. Sementara itu pemberontak menghendaki ditempatkannya pasukan AS dan Uni Eropa di Darfur.

Pada tanggal 10 Maret 2005 DK-PBB telah melaksanakan pertemuan guna membahas situasi di Sudan. Pada pertemuan tersebut telah disahkan resolusi 1585 dengan isi pokok sebagai berikut menegaskan kembali kesiapan untuk membantu

<sup>56</sup> G. L. P. H. 2006/1. 1. 2006/1. G. H. SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 2 dan seterusnya

Sudan dalam proses perdamaian dan memutuskan untuk memperpanjang mandat United Nation Advance Mission Sudan (UNAMIS) yang dibentuk berdasarkan resolusi 1547 (2004) hingga tanggal 17 Maret 2005.<sup>57</sup>

Pada tanggal 30 Maret 2005 DK-PBB mengeluarkan resolusi sanksi tambahan untuk Sudan terkait dengan masalah Darfur, resolusi ini akan berlaku selama 30 hari. Sanksi itu berisi larangan bagi individu pelaku kejahatan perang untuk bepergian ke luar negeri dan pembekuan rekening mereka di luar negeri, embargo senjata untuk Pemerintah Sudan, serta melarangan pesawat pemerintah melakukan operasi militer di Darfur. Resolusi tersebut disetujui 12 negara dan 3 negara abstain yaitu Rusia, China dan Al Jazair pada hari Selasa 15 Maret 2005. Sedangkan Amerika Serikat menyambut baik resolusi ini dengan harapan dapat membuka kembali perundingan antara Pemerintah Sudan dan Kelompok Pemberontak di Darfur yang menemui kebuntuan. Namun tiga negara yang abstain dalam veto tersebut berpendapat bahwa pemberian sanksi tidak akan bermanfaat dan hanya akan memberikan dampak negatif bagi proses perdamaian.<sup>58</sup>

Resolusi DK-PBB 1593 tanggal 1 April 2005 mengenai pengajuan tersangka pelanggaran HAM di Darfur ke Mahkamah Internasional (ICC) menimbulkan pertentangan. Presiden Omar Hassan Bashir menolak warganya

---

<sup>57</sup> *Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc, op.cit., hal.8*

<sup>58</sup> *Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc, op.cit.*

diadili ke luar negeri (ICC) baik dari jajaran Pemerintah maupun partai oposisi.<sup>59</sup> Presiden Bashir menekankan bahwa pengadilan bagi tersangka pelanggar HAM Darfur harus dilakukan di dalam negeri sebagaimana posisi pemerintah yang berdaulat serta untuk menunjukkan kemampuan pengadilan Sudan yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hal ini bukan berarti Pemerintah mengakui daftar ke-51 tersangka pelanggar HAM di Darfur, akan tetapi sebagai isyarat kepada masyarakat internasional bahwa siapapun warga Sudan yang melanggar hukum maka akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Sudan.

Masalah pengajuan tersangka pelanggar HAM di Darfur ke ICC selama ini menjadi hambatan bagi Pemerintah Sudan untuk segera menyelesaikan krisis di Darfur. Pemerintah menginginkan pengadilan tersebut dilakukan di dalam negeri sementara kelompok pemberontak menginginkan di lakukan di ICC. Resolusi DK-PBB 1593 juga mendapat reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat. Terjadinya berbagai demo yang melibatkan ribuan mahasiswa dan perhimpunan pemuda guna menyampaikan tuntutan ke kantor perwakilan PBB untuk memprotes resolusi tersebut dan menilai DK-PBB sebagai alat negara-negara besar untuk menjalankan bentuk penjajahan baru. Resolusi 1593 telah mengecilkan peran Uni Afrika atas semua upaya mediasi yang telah dilakukan terkait dengan penyelesaian konflik antara Pemerintah Sudan dan Pemberontak Darfur. Dengan diadopsinya resolusi tersebut, keadaan Sudan makin sulit karena apabila penolakan atas resolusi tersebut terus berlanjut dikhawatirkan akan ada

---

<sup>59</sup> Sub-Item III 2006/ Sudan 2006/ PBB/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3 doc on cit



resolusi-resolusi lainnya yang lebih menekan Pemerintah Sudan dan pada gilirannya akan menyengsarakan rakyat Darfur.

Konflik Darfur kian memanas setelah tercapainya persetujuan perdamaian antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak Sudan Selatan *Sudanese People's Liberation Army* (SPLA) pimpinan John Garang pada 9 Januari 2005 di Naivasha, Kenya. Hal tersebut mengindikasikan adanya benang merah antara pergolakan di Sudan Selatan dan Darfur. Nampaknya terdapat persamaan kepentingan yang mendorong pihak pemberontak dan oposisi dalam menghadapi sikap Pemerintah Sudan. Oleh karenanya masalah Darfur dianggap sebagai isyarat dan rekayasa pihak oposisi untuk mencapai tuntutan agar dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan dalam periode pra interim (Januari-Juni 2005) dan pembentukan Pemerintahan interim 2005-2011.

Pemerintah Sudan akan terus berupaya menyelesaikan masalah Darfur dengan kerangka mediasi Uni Afrika. Pada 7 Juli 2005 Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak SLM dan JEM mencapai kesepakatan atas Deklarasi Prinsip Damai di Abuja. Beberapa suku utama yang selama ini bertikai di daerah itu yaitu Rizaekat dan suku Maisiriah menandatangani Memorandum Damai Hidup Berdampingan Secara Damai. Isi memorandum antara lain mengimbau agar segera mengadakan penghentian permusuhan, menjalin kerjasama dan membuka akses lintas hubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mengamankan sumber air dan kebebasan bergerak. Pemerintah Sudan

menyambut baik kesepakatan tersebut dan berjanji akan membantu merealisasikannya.<sup>60</sup>

Pemerintah Sudan telah memfasilitasi persetujuan damai antar berbagai suku di Darfur (*Agreement on faithful between tribes*). Persetujuan tersebut diikuti oleh dua suku mayoritas di Darfur yaitu suku Arab dan suku Fur (suku asli Darfur), namun tidak melibatkan dua kelompok pemberontak Darfur, SLM dan JEM. Pemerintah Sudan melakukan program enam bulan pertama pelaksanaan persetujuan tersebut antara lain mengenai pemulangan para pengungsi, rekonsiliasi antar suku, pelucutan senjata bagi kelompok bersenjata. Pemerintah Inggris, Jepang, Chad dan Libya telah memberikan tanggapan akan mendukung program tersebut.

Pada tanggal 4 Oktober 2005, Pemerintah Sudan dan Pemberontak Darfur di Abuja, Nigeria mulai melakukan perundingan mengenai tiga hal pokok yang menjadi tuntutan kelompok pemberontak Darfur selama ini yaitu pembagian kekuasaan secara adil, kebebasan dan hak. Kelompok pemberontak JEM dan SLM telah menyampaikan kepada mediator kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mempertimbangkan tuntutan pokok kelompok pemberontak Darfur.<sup>61</sup> Pemerintahan Interim melontarkan sebuah inisiatif untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Inisiatif tersebut antara lain :

---

<sup>60</sup>Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc, op.cit., hal.15

- c. menghimbau pentingnya untuk mempersatukan visi politik bagi semua warga Darfur,
- d. mengangkat masalah Darfur ke tingkat pusat dengan memperhatikan dan menyesuaikan visi dan strategi dengan tetap mempertahankan persatuan dan menjauhi kepentingan kelompok/ suku/ pribadi,
- e. pentingnya mengangkat suara rakyat dan menekan pihak yang berunding di Abuja agar mencapai kesepakatan kompromi,
- f. saling menyadari akan kerugian yang diakibatkan oleh perang dan bersatu mewujudkan keamanan,
- g. menyadari bahwa penggunaan senjata tidak akan mewujudkan perdamaian,
- h. pentingnya mengadakan studi tentang kebutuhan pembangunan Darfur seiring dengan perkembangan politik dan ekonomi yang sedang terjadi di Sudan.

Mulai 25 Oktober 2005, kelompok Pemberontak utama Darfur memulai pembicaraan untuk menyatukan kepemimpinan diantara mereka yang terpecah akibat perbedaan kepentingan dan rendahnya kepercayaan diantara mereka. Terpecahnya kelompok ini telah menjadi penghalang dalam mediasi kerja Uni Afrika dalam penyelesaian konflik Darfur. Pertemuan ini diprakasai oleh *Sudanese Liberation Army* (SLA). Uni Afrika, Uni Eropa, Amerika Serikat dan PBB mendukung penuh prakarsa tersebut, beberapa isu penting telah dibicarakan antara lain masalah *military central front*, perlawanan bersama, pembasiran

wilayah berdasarkan sejarah dan tempat-tempat pertahanan. Namun pertemuan tersebut gagal karena diboikot oleh JEM.

Kelompok pemberontak *Sudanese Liberation Movement* (SLM) menyelenggarakan konferensi 30 Oktober-2 November 2005 dan memilih Moni Arkewei Manay sebagai sekjen SLM yang baru menggantikan posisi Abdul Wahid Abdul El Noor (keduanya merupakan dua figure pemberontak SLM) dan menetapkan kerangka baru perwujudan perdamaian Darfur. SLM menyatakan perundingan putaran selanjutnya yang dijadwalkan pertengahan November 2005 di Abuja diharapkan sebagai perundingan terakhir dan dapat mengikutsertakan seluruh unsur penting. SLM menilai bahwa dialog dan perundingan merupakan pilihan utama untuk menyelesaikan konflik.<sup>62</sup>

Mulai 3 Desember 2005, Pemerintah Sudan dan SLM memulai perundingan damai putaran ke-7 di Abuja, Nigeria atas mediasi Uni Afrika. Putaran tersebut antara lain membahas masalah pembagian kekuasaan, kekayaan negara dan pengaturan keamanan.<sup>63</sup> Perundingan damai antara pemerintah dengan SLM nampaknya masih akan berlangsung lama, mengingat salah satu fraksi pemberontak yaitu JEM tidak hadir dalam perundingan tersebut karena tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan SLM dalam menentukan delegasi wakil kelompok pemberontak Darfur. Perundingan sebelumnya dapat dikatakan tidak

---

<sup>62</sup>Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc, *op.cit.*, hal.17

<sup>63</sup>Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ SITUASI DAN KONDISI POLITIK SUDAN 3.doc, *op.cit.*

sukses karena alasan yang sama, sehingga mediator Uni Afrika menganggap perlu mempersatukan barisan pemberontak sebelum perundingan putaran ke-7 dimulai.

Sementara itu Pemerintah Sudan dan Partai Kongres Nasional pimpinan Omar Hassan Bashir, mengecam laporan *Human Right Watch* yang meminta agar DK-PBB mengeluarkan perintah untuk mengadili 20 orang pejabat Pemerintah Sudan yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan di Darfur. Pemerintah Sudan beranggapan bahwa *Human Right Watch* mengabaikan perkembangan positif yang terjadi di Sudan, namun hanya fokus pada hal-hal negatif yang pada akhirnya hanya menghambat upaya Pemerintah Sudan mewujudkan demokrasi dan perdamaian.

Pada tanggal 24 Maret 2006 DK-PBB mengesahkan Resolusi 1663 mengenai situasi di Sudan. Resolusi tersebut menyetujui perpanjangan mandat misi PBB, UNMIS (*United Nations Mission in Sudan*) hingga tanggal 24 September 2006.<sup>64</sup> UNMIS merupakan misi perdamaian PBB yang dibentuk melalui resolusi 1590 DK-PBB tanggal 24 Maret 2005 dan bertugas di wilayah Sudan Selatan. UNMIS memiliki mandat antara lain mendukung pelaksanaan *Comprehensive Peace Agreement* antara Pemerintah Sudan dan SPLA yang ditandatangani di Naivasha, Kenya pada tanggal 9 Januari 2005.

Di samping itu DK-PBB meminta Sekjen PBB bekerjasama dengan Uni Afrika untuk mempercepat penyusunan rencana transisi dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS) menjadi misi Perdamaian PBB sebagai *contingency*

---

<sup>64</sup>Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ KONFLIK DARFUR/ Perkembangan Terakhir Darfur  
2006, hal. 10, diakses di <http://www.tempo.co.id>, Departemen Luar Negeri PBB, hal. 1

*plan* dari DK yang tertuang dalam *Presidential Statement* DK tanggal 3 Februari 2006. Berkaitan dengan percepatan rencana transisi dari AMIS ke PBB tersebut, Amerika Serikat telah melakukan berbagai pendekatan dalam rangka menggalang dukungan terhadap rencana transisi tersebut. Pendekatan ini dilakukan mengingat beberapa negara anggota DK-PBB seperti Amerika Serikat dan Inggris berkeinginan agar PBB dapat mengambil alih misi perdamaian di Darfur secara keseluruhan.

Ketegangan antara Pemerintah Sudan dengan PBB mulai tampak sejak pihak PBB merencanakan akan mengganti pasukan Uni Afrika di Darfur dengan Pasukan Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Rencana ini ditentang oleh Pemerintah Sudan dan banyak pihak, termasuk oleh negara-negara Liga Arab. Pada KTT Liga Arab ke-18 yang diselenggarakan di Khartoum pada tanggal 28-29 Maret 2006, para pemimpin Arab menekankan dukungan dan kerjasamanya dengan Uni Afrika dalam menangani masalah Darfur, mengawasi gencatan senjata dan menegaskan bahwa setiap permintaan pengiriman pasukan ke Darfur harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Sudan.<sup>65</sup> Liga Arab juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pasukan Arab-Afrika dalam pasukan Uni Afrika dan memberikan dukungan finansial sebesar US \$ 150 juta kepada pasukan Uni Afrika di Darfur selama 6 bulan sampai Oktober 2006.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> *Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ KONFLIK DARFUR/ Perkembangan Terakhir Darfur 2006.doc, log.cit., hal.1*

<sup>66</sup> *Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ KONFLIK DARFUR/ Perkembangan Terakhir Darfur 2006.doc, log.cit., hal.1-2*

Untuk mendukung pengalihan tugas misi Uni Afrika menjadi Pasukan Internasional PBB sebagai bagian kerjasama kedua organisasi dalam menyelesaikan konflik Darfur maka dikeluarkanlah resolusi DKP-Uni Afrika pada 10 Maret 2006. Memperpanjang tugas Pasukan Uni Afrika di Darfur hingga 30 September 2006 untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan. Jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan dalam rangka menghadapi pengalihan tugas Pasukan Uni Afrika menjadi Pasukan Internasional PBB.

DKP-Uni Afrika tampaknya melihat aparat keamanan Sudan kurang mampu mengontrol situasi keamanan di wilayah tersebut dan perlindungan terhadap situasi kemanusiaan di wilayah tersebut sangat minim. Oleh karena itu, DKP-Uni Afrika menganggap perlu memberikan tenggang waktu kepada Pemerintah Sudan dalam penyelesaian masalah Darfur. Apabila tenggang waktu tersebut habis namun masalah Darfur masih berlanjut, maka DKP-Uni Afrika akan konsisten mengalihkan tugas dan misi Pasukan Uni Afrika menjadi Pasukan Internasional PBB.

Pada tanggal 25 April 2006 DK-PBB mengesahkan Rancangan resolusi/ranres yang diajukan oleh AS mengenai pemberlakuan sanksi terhadap 4 oknum yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Darfur. Sanksi tersebut meliputi larangan bepergian ke luar negeri dan pembekuan deposito atau aset keempat orang dimaksud yang ada di luar negeri. Keempat orang tersebut adalah: Sheikh Mousa Hilal (pemimpin milisi Janjawed Arab), Mayjen Gaafar Hassan (Komandan Operasional Wilayah Barat Sudan), Gibril Abdul Karim (tokoh

pemberontak *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan Adam Yyaub (Ketua Gerakan Reformasi dan Pembangunan di Darfur).<sup>67</sup>

Pengesahan Ranres tersebut didukung oleh 12 negara anggota dan 3 negara lainnya yang abstain yaitu China, Rusia dan Qatar. Sementara itu, Perancis menyambut baik langkah DK-PBB dimaksud dan mengatakan bahwa resolusi tersebut merupakan komitmen masyarakat internasional untuk tidak membiarkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua pihak yang bertikai khususnya kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu Pemerintah Sudan berpandangan bahwa resolusi tersebut tidak tepat karena kedua pihak berkonflik tengah berunding di Abuja dan membutuhkan dukungan dari masyarakat internasioanl.

## 2. *Darfur Peace Agreement (DPA)*

Pada tanggal 5 Mei 2006 Pemerintah Sudan dan *Sudanese Liberation Movement* (SLM) pimpinan Minni Minawi telah menandatangani Kesepakatan Persetujuan Damai di Abuja mengenai penyelesaian konflik Darfur. Penandatanganan tersebut merupakan upaya keras dari mediator Uni Afrika dan Libya serta negara-negara Barat yang selama ini peduli terhadap penyelesaian masalah Darfur.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ KONFLIK DARFUR/ Perkembangan Terakhir Darfur 2006.doc, op.cit., hal.3

<sup>68</sup>S.L.P. III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ KONFLIK DARFUR/ Perkembangan Terakhir Darfur



Dalam *Darfur Peace Agreement* mengharuskan Pemerintah Sudan melucuti persenjataan dan memobilisasi milisi Arab Janjaweed pada pertengahan bulan Oktober 2006, serta menarik pasukan Sudan di wilayah Darfur. Melalui pengawasan Uni Afrika milisi Arab Janjaweed harus sudah dilucuti senjatanya sebelum pasukan Pemberontak Darfur berkumpul dan mempersiapkan diri untuk melucuti senjata mereka sendiri.

Proses demokratisasi tengah dibangun di kawasan Darfur. Rakyat Darfur dapat memilih pemimpin mereka dan menentukan status mereka sebagai suatu wilayah otonomi. Perjanjian Damai Darfur memprakarsai berdirinya Pemerintah Daerah Transisi Darfur (TDRA) sebagai otoritas sementara untuk daerah Darfur. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa referendum tentang otonomi untuk Darfur harus dilakukan selambat-lambatnya 2011. Minni Minnawi dari kelompok pemberontak SLA menjadi ketua dari TDRA tersebut. Melalui perjanjian damai tersebut TDRA akan bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian perdamaian di Darfur dan mengontrol gerakan pemberontak.

*Darfur Peace Agreement* merupakan perjanjian yang membahas marginalisasi Darfur sebagai upaya mencapai perdamaian di kawasan Darfur. Kesepakatan tersebut meliputi penyelesaian politik, pengaturan keamanan dan penyelesaian ekonomi yang pada intinya berisi antara lain :

- a. Dalam masalah politik, Pemerintah Sudan sepakat untuk memberikan posisi Wakil Presiden kepada kelompok Pemberontak Darfur selama pemerintahan transisi wilayah Darfur. Wakil Presiden dimaksud memiliki

kewenangan luas dalam mengatur jalannya pemerintahan di wilayah Darfur dan apabila terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan kesepakatan damai antara pemerintahan transisi dan Pemerintah Darfur maka yang berwenang untuk menyelesaikan hal tersebut adalah Presiden.

- b. Dalam masalah pengaturan keamanan (*security arrangement*), kedua pihak baik Pemerintah Sudan maupun Pemberontak Darfur sepakat untuk menggabungkan 4000 pasukan kelompok pemberontak dalam angkatan bersenjata Sudan, 1000 diantaranya akan digabungkan kedalam kepolisian dan 3000 di antaranya akan digabungkan ke dalam pelayanan sipil.
- c. Dalam masalah ekonomi, kedua pihak sepakat untuk mendirikan Badan Pembangunan di mana pemerintah harus memenuhi 300 juta dolar untuk biaya pembangunan di wilayah Darfur dan 30 juta dolar lainnya setiap bulannya yang akan diambil dari negara-negara donor internasional.<sup>69</sup>

Kesepakatan tersebut mendapat sambutan positif dari semua pihak yang selama ini aktif dalam membantu Pemerintah Sudan menyelesaikan konflik Darfur seperti AS, Inggris, Norwegia, Belanda dan Jerman serta negara-negara sahabat Sudan antara lain Mesir, Libya, dan Nigeria sebagai mediator.

Pemerintah Sudan menyatakan masih adanya penolakan dari beberapa kelompok pemberontak di Darfur antara lain kelompok JEM untuk menandatangani *Darfur Peace Agreement*. JEM merupakan faksi pemberontak terbesar dan terkuat, sementara SLA Abdul Wahid mempunyai pengaruh yang kuat karena merupakan representasi suku Fur dan menguasai beberapa wilayah di

Darfur. Namun demikian Pemerintah tetap berupaya keras agar semua faksi pemberontak di Darfur dapat ikut serta menandatangani persetujuan tersebut demi terwujudnya perdamaian yang menyeluruh.

### **3. Masa Setelah *Darfur Peace Agreement* (DPA)**

Setelah disetujuinya *Darfur Peace Agreement* pada 5 Mei 2006 ternyata masih memunculkan bentrokan-bentrokan yang terjadi di beberapa bagian wilayah Darfur, terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menolak disepakatinya perjanjian damai tersebut. Setelah *Darfur Peace Agreement* beberapa pihak internasional memunculkan gagasan untuk menempatkan pasukan internasional PBB ke wilayah Darfur yang kemudian ditolak Pemerintah Sudan.

Pada tanggal 5 Juni 2006 delegasi DK-PBB yang terdiri dari 15 pejabat tinggi mewakili 15 anggota DK-PBB melakukan kunjungan ke Sudan selama 2 minggu. Kunjungan tersebut ditujukan untuk melakukan serangkaian dialog untuk mencari jalan keluar penyelesaian konflik Darfur. Pada pertemuannya dengan Presiden Bashir, delegasi DK-PBB menegaskan kembali keinginan PBB untuk menjadi mitra Pemerintah Sudan dalam menyelesaikan masalah Darfur. Dinyatakan pula bahwa PBB tidak akan mengirim pasukan internasional ke Darfur tanpa ada persetujuan awal dari Pemerintah Sudan. Sebagai lembaga internasional PBB tetap menghormati kedaulatan dan kemerdekaan negara Sudan.<sup>70</sup>

Menanggapi hal tersebut Presiden Bashir menyatakan bahwa pemerintahnya tetap pada posisinya yang menolak pengiriman pasukan internasional PBB ke Darfur berdasarkan *Chapter VII Memorandum PBB*. Hal ini karena rakyat Sudan dan warga Darfur khususnya tidak menerima keberadaan pasukan asing di tengah-tengah masyarakat kecuali dari Afrika. Selain itu Presiden juga menyatakan bahwa pemerintahannya juga konsisten dengan kesepakatan yang telah dicapai di mana Sudan sepakat untuk mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Uni Afrika dengan membentuk sebuah Komite Khusus untuk masalah tersebut.

Tekanan dari sebagian masyarakat internasional terhadap Pemerintah Sudan untuk menerima penggantian pasukan Uni Afrika menjadi pasukan internasional PBB terus meningkat. Hal tersebut karena alasan kurangnya pendanaan Uni Afrika bagi penempatan pasukannya di wilayah Darfur, serta alasan-alasan lainnya. Pemerintah Sudan menegaskan kembali posisinya yang tetap menolak masuknya pasukan internasional PBB bagi penyelesaian konflik Darfur dan mengharapkan agar Uni Afrika dapat melanjutkan misi perdamaiannya di wilayah tersebut dengan tetap memperoleh dukungan dan fasilitas dari masyarakat internasional dengan alasan :

- a. Piagam PBB mendukung organisasi regional dalam penyelesaian isu-isu regional di wilayahnya. Dalam hal ini Uni Afrika adalah organisasi regional yang paling berhak dan pantas untuk menyelesaikan isu-isu di wilayah Afrika termasuk konflik Darfur.

- b. Pasukan Uni Afrika dapat melaksanakan tugas misi perdamaiannya di Darfur dengan baik dan telah berpengalaman serta mendapat kepercayaan dari pihak-pihak yang bertikai beserta masyarakatnya, yang didukung oleh ikatan sosial budaya yang erat sehingga tidak dilihat adanya campur tangan dari pihak asing. Kelangsungan misi perdamaian Uni Afrika di wilayah Darfur hingga saat ini mengindikasikan adanya dukungan materi dan logistik bagi pasukan Uni Afrika tersebut.
- c. Gagasan penggantian pasukan Uni Afrika dengan pasukan internasional PBB muncul sebelum penandatanganan Kesepakatan Damai Darfur (*Darfur Peace Agreement*). Setelah penandatanganan DPA gagasan tersebut tidak lagi cocok karena hal yang lebih penting saat ini adalah bagaimana mengupayakan pelaksanaan isi kesepakatan secara maksimal dan menghimbau pihak yang belum menandatangani perjanjian tersebut untuk dapat menandatangani. Masuknya pasukan internasional PBB hanya akan memberikan sinyal negatif bagi pihak yang bertikai di mana mereka baru saja memupuk semangat perdamaian.
- d. Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai tersebut tidak dinyatakan sama sekali keterlibatan pasukan internasional, sehingga masuknya pasukan tersebut dalam penyelesaian konflik Darfur dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
- e. Situasi internasional saat ini menunjukkan bahwa keterlibatan pasukan internasional dalam penyelesaian masalah dalam negeri suatu negara akan

mengakibatkan situasi yang lebih kompleks dari pada penyelesaian masalah itu sendiri.

- f. Perkembangan hubungan Sudan, baik dalam konteks regional maupun bilateral dengan negara-negara tetangga terutama dengan Eritrea dan Chad saat ini sangat positif. Hubungan diplomatik Sudan dengan kedua negara kini telah pulih kembali. Situasi kondusif tersebut akan mendorong percepatan penyelesaian konflik di wilayah Darfur.
- g. Adanya keheranan dari Pemerintah Sudan terhadap langkah yang diambil oleh beberapa anggota DK-PBB yang mendukung resolusi mengenai penempatan pasukan asing di Darfur. Kenyataannya pada tanggal 2 Agustus 2006 lalu, Pemerintah Sudan baru saja menyerahkan kepada PBB rencananya dalam menyelesaikan konflik Darfur yang selaras dengan kesepakatan Presiden Sudan dan Sekjen PBB di sela-sela pertemuan mereka pada saat KTT Uni Afrika di Banjoul. Desakan dari beberapa anggota DK-PBB tersebut justru muncul pada saat Uni Afrika dan pihak-pihak pada perjanjian Abuja tengah melakukan langkah-langkah serius dalam mengimplementasikan isi perjanjian tersebut. Dengan demikian disinyalir adanya maksud-maksud tertentu dari kekuatan asing melalui rencana penempatan pasukan internasional di Darfur yang merupakan tujuan akhir mereka dan bukan untuk membantu masyarakat Sudan mencapai perdamaian dan stabilitas di Darfur.<sup>71</sup>

Pada tanggal 31 Agustus 2006, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1706 yang berisi perpanjangan mandat UNMIS yang juga akan mencakup wilayah Darfur. Presiden Sudan Omar Hassan Bashir menegaskan bahwa Pemerintah Sudan menolak resolusi tersebut dan akan berkonfrontasi dengan pasukan asing jika PBB bersikeras mengirim pasukan internasional ke wilayah Darfur.<sup>72</sup> Pemerintah Sudan menilai pengiriman pasukan internasional ke Darfur akan membuat situasi dalam negeri semakin kacau. Selain itu di Sudan Selatan sudah terdapat pasukan internasional PBB sehingga bila ditempatkan lagi pasukan internasional ke Darfur maka Pemerintah Sudan menilai sebagai sebuah ancaman khususnya dalam masalah stabilitas dan keamanan wilayah-wilayah Sudan.

Menanggapi situasi ini, AMIS yang pada mulanya akan mengakhiri masa penempatannya di wilayah Darfur hingga 30 September 2006 akhirnya disepakati perpanjangan masa mandatnya hingga 31 Desember 2006. Perpanjangan mandat ini juga didukung oleh kesepakatan negara-negara Arab untuk memberikan bantuan pendanaan AMIS sebesar US \$ 150 juta.<sup>73</sup> Liga Arab menganggap bahwa penyelesaian masalah Darfur harus ditempuh secara bijaksana bukan dengan kekerasan atau penerapan sebuah resolusi yang berakibat fatal. Segala sesuatu yang bermuara ke arah penyelesaian konflik Darfur akan didukung oleh Liga Arab. Liga Arab mengharapkan agar Pemerintah Sudan dapat segera

---

<sup>72</sup>*Subdit III 2006/ Sudan 2006/ Profil/ KONFLIK DARFUR/ Perkembangan Terakhir Darfur 2006.doc, op.cit., hal.7*

menyampaikan inisiatif yang telah digagas kepada PBB guna menghindari konfrontasi dengan masyarakat internasional.

Namun demikian AS masih terus mendesak Pemerintah Sudan agar mau menerima pasukan Internasional. AS meminta Pemerintah Sudan untuk segera melakukan gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak Darfur dan mengancam kelompok pemberontak yang belum menandatangani persetujuan damai untuk memberikan sanksi apabila tidak bergabung ke dalam Perjanjian Damai Darfur. Selain itu AS juga memberikan opsi kepada Pemerintah Sudan apakah akan menerima pasukan internasional PBB di Darfur atau konfrontasi dengan masyarakat internasional.

Melihat situasi yang kian meruncing maka diajukan alternatif baru. Untuk menghindari kesan ekspansi tersebut diusulkan pengiriman pasukan dari negara Arab Islam dan Asia. Sudan menyambut baik ide tersebut namun dengan syarat pasukan tersebut harus tetap di bawah komando Uni Afrika dengan bantuan teknis dan logistik dari masyarakat internasional dan PBB.

Sementara itu situasi di Darfur masih diwarnai dengan bentrokan antara satu kelompok pemberontak dengan kelompok lain khususnya kelompok-kelompok yang belum menandatangani persetujuan damai. Pada tanggal 14 Oktober 2006 Presiden George W. Bush menandatangani UU Perdamaian Darfur yang memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat Sudan yang terlibat dalam pelanggaran HAM, *ethnic cleansing* dan genosida di wilayah Darfur. UU tersebut juga meliputi larangan transfer income minyak Sudan dan larangan bagi



pengusaha Amerika untuk bekerjasama dengan Sudan kecuali dalam hal bantuan obat-obatan dan pangan ke wilayah konflik.<sup>74</sup>

Di sisi lain Qatar berinisiatif untuk membantu mediasi antara Sudan dengan PBB dan AS untuk mencapai hasil yang dapat diterima bersama. Sementara Perancis menyarankan pembentukan suatu badan baru yang membantu penyelesaian masalah Darfur dan melibatkan masyarakat internasional termasuk PBB, Liga Arab, Uni Eropa, Uni Afrika, dan OIC.

Mesir dan Liga Arab dalam inisiatifnya mengusulkan agar semua perlakuan dan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap Pemerintah Sudan dapat dihindari. Untuk itu diusulkan agar PBB mengeluarkan resolusi baru yang disetujui dan diterima baik oleh Pemerintah Sudan. Pengiriman pasukan PBB ke Sudan haruslah atas persetujuan Pemerintah Sudan. Untuk itu diharapkan bahwa pasukan tersebut hendaknya didominasi oleh pasukan dari negara-negara Afrika di samping mengikutsertakan pula pasukan Uni Afrika.

Pada tanggal 30 November 2006 dilangsungkan pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia sehubungan dengan penempatan pasukan keamanan PBB. Akhirnya kesepakatan dengan pemerintah Sudan dicapai bahwa bantuan pasukan internasional PBB ke AMIS dilakukan dalam tiga tahap yaitu ringan (pemberian bantuan financial kepada Uni Afrika), berat (bantuan teknis dan logistik) dan pengiriman pasukan bersama yang terdiri dari Uni Afrika dan PBB. Persetujuan tersebut mengindikasikan kesungguhan pemerintah Sudan untuk bekerjasama

---

<sup>74</sup> *Journal of International Law*, 2006/1, 61-62. *CONFLICT RESOLUTION*, 2006/1, 61-62.

dengan PBB namun tetap dalam lingkup DPA dengan menitikberatkan pada pemberdayaan Uni Afrika yang telah diperpanjang masa tugasnya hingga bulan Juni 2007 (perpanjang 6 bulan terhitung bulan Desember 2006).

Pada awal Januari 2007 dukungan pada tahap ringan telah selesai dan dimulai tahap berikutnya. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Juli 2007 dibentuklah resolusi DK-PBB 1769 yang intinya mengamankan pasukan gabungan/ *hybrid operation* PBB dan Uni Afrika dengan nama UNAMID (*United Nations-African Union Mission In Darfur*). Unsur utama pasukan penjaga perdamaian tetap berasal dari Uni Afrika dengan dukungan dari PBB. UNAMID ini menggelar 25.987 personel yang terdiri dari 19.555 personel militer dan 3.772 personel polisi sipil.

Walaupun PBB dan Uni Afrika sudah menggelar operasi gabungan di Darfur, namun situasi keamanan dan kemanusiaan masih tetap buruk. Hal ini disebabkan :

- a. Kurangnya komitmen antara Pemerintah Sudan dan faksi-faksi pemberontak untuk duduk di meja perundingan, serta menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai. Setiap perundingan selalu diakhiri dengan kebuntuan (*deadlock*) karena tidak sinkronnya tuntutan para pihak yang terlibat.

- b. Lambatnya kinerja personel UNAMID di lapangan, sehingga personel yang ada tidak dapat menguasai wilayah-wilayah konflik yang sangat

luas. Sampai bulan Agustus 2009 (setelah hampir 2 tahun UNAMID digelar) baru 71% kekuatan yang tergelar di lapangan.

- c. Kurangnya perlengkapan yang dimiliki UNAMID terutama helikopter angkut pasukan dan helikopter angkut barang bantuan, yang membuat mobilitas pasukan di lapangan terhambat. Infrastruktur yang jelek dan kondisi medan yang berat membuat mobilitas dari satu titik ke titik yang lainnya perlu alat angkut udara.
- d. Campur tangan asing yang ingin mendestabilisasi Sudan turut memperkeruh upaya-upaya penyelesaian konflik Darfur.
- e. Pasca dikeluarkannya surat penetapan tersangka atas Presiden Sudan oleh *International Criminal Court* (ICC) dan setelah diusirnya 13 LSM Internasional oleh Pemerintah Sudan, kondisi kemanusiaan di wilayah Darfur semakin buruk. Kelaparan, kekurangan air bersih, perawatan kesehatan yang buruk dan penyebaran penyakit di kamp-kamp pengungsi menyebabkan tingkat kematian sangat tinggi.<sup>75</sup>

Pada 14 Juli 2008 ketua jaksa penuntut Mahkamah Kejahatan Internasional atau *International Criminal Court* (ICC), Luis Moreno Ocampo, mengumumkan tuntutan kejahatan kepada Presiden Sudan. Presiden Bashir dituduh mengotaki dan melaksanakan rencana penghancuran pada bagian yang substansial atas tiga suku di Darfur dikarenakan kesukuan mereka dan meminta agar ICC menetapkan Presiden Sudan sebagai tersangka karena telah melakukan

---

<sup>75</sup> *Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia*,  
<http://www.korpsikopolisiindonesia.com/main.php?page=zoom&id=200>, diakses 18 Januari

tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional berupa kejahatan perang (*war crimes*), pemusnahan etnik (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Tapi karena bukti-bukti yang diajukan belum mencukupi maka hakim ICC memerintahkan jaksa penuntut untuk mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat tuduhan-tuduhan yang diajukan.

Setelah bukti-bukti mencukupi, jaksa Ocampo kembali mengajukan tuntutan-tuntutannya kepada hakim ICC. Pada tanggal 4 Maret 2009, ICC mengumumkan secara resmi Presiden Sudan Omar Hassan Bashir sebagai tersangka atas 7 tuduhan yaitu 5 tuduhan karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan 2 tuduhan karena melakukan kejahatan perang (*war crimes*). Tuduhan diajukan karena Presiden Sudan dianggap sebagai dalang kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Sudan dan Janjaweed terhadap rakyat Darfur, berupa pembunuhan (*murder*), pemusnahan (*exterminate*), perkosaan (*rape*), penganiayaan (*torture*), pemindahan dengan paksa (*forcibly transferring large number of civilian*). Sedangkan tuduhan melakukan kejahatan perang (*war crimes*) adalah penjarahan dalam waktu perang (*pillaging*) dan penyerangan terhadap penduduk sipil (*attack civilian*). Untuk kejahatan genosida bukti-bukti yang diajukan belum cukup sehingga tidak dapat dituntut melakukan genosida.

Meskipun mengalami banyak tantangan dan tekanan dari luar, Pemerintah Sudan tetap bertekad untuk segera menyelesaikan konflik Darfur tersebut. Wujud dari tekad Pemerintah Sudan terlihat melalui perundingan damai dengan kelompok pemberontak yang terus diupayakan. Dengan dukungan mediasi Qatar

telah dilangsungkan 4 putaran perundingan. Pada Februari 2009 berlangsung perundingan I di Doha, Qatar antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak JEM mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan untuk mencapai perjanjian perdamaian resmi. Kemudian dilanjutkan perundingan II pada Mei 2009.

Namun perundingan III baru mulai terlaksana pada 23 Februari 2010. Pemerintah Sudan dan pemberontak JEM menandatangani perjanjian gencatan senjata dan sepakat untuk mencapai sebuah perjanjian penuh yang akan ditandatangani sebelum 15 Maret 2010, namun perundingan tersebut ditolak oleh pemberontak SLA. Pada 15-18 Maret 2010 dilangsungkan perundingan IV Doha, dengan hasil yang masih berlarut-larut sebab perundingan mengalami kebuntuan dengan menolaknya JEM atas perundingan yang telah dilama diupayakan tersebut.

Krisis Darfur jika ditelisik lebih jauh memiliki tiga faktor penyebab utama sehingga menghasilkan konflik seperti sekarang ini. *Pertama*, adanya konflik lama yang sudah terjadi puluhan tahun diantara suku-suku di Darfur terkait dengan masalah tanah, padang gembalaan dan masalah air. *Kedua*, adanya marginalisasi Darfur oleh pemerintah pusat di Khartoum baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial-budaya yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Dan *ketiga*, adalah faktor dari luar yaitu pertarungan pengaruh negara-negara Barat yang ingin menguasai sumber daya minyak Darfur. Meski kondisi Darfur masih memanas dengan terjadinya bentrokan di beberapa lokasi namun upaya damai terus diupayakan. Hal tersebut dapat terlihat dari kesediaan

faksi-faksi yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan dengan membuka kembali dialog dengan Pemerintah Sudan. Selain itu, dukungan sejumlah negara-negara sahabat kepada Sudan serta masyarakat internasional makin mendorong terciptanya perdamaian Darfur.

### **C. Penahapan Konflik Darfur**

Dinamika konflik yang terjadi di Darfur dapat dicermati melalui penahapan-penahapan konflik. Menurut Fisher terdapat lima tahapan konflik yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.

#### **1. Prakonflik**

Awalnya persengketaan di kawasan Darfur terjadi karena masalah perebutan sumber daya alam antara etnis Afrika Hitam Darfur dengan Afrika Arab. Perebutan terjadi karena adanya perbedaan profesi, di mana mayoritas etnis Afrika Hitam bekerja sebagai petani yang telah menempati kawasan tersebut sebagai warisan nenek moyang harus berebut lahan pertanian dan cadangan air dengan etnis Afrika Arab sebagai peternak yang hidupnya selalu berpindah-pindah dan merupakan pendatang di kawasan Darfur. Bentrokan di antara keduanya tidak dapat terelakkan.

Ketika bentrokan antar etnis tersebut kian memanas, Pemerintah Sudan malah membantu mempersenjatai etnis Afrika Arab yang tergabung dalam milisi bersenjata Janjaweed. Aksi yang dilakukan Pemerintah Sudan tersebut makin

memanaskan situasi politik dan sosial Darfur. Akhirnya konflik ini pun melebar dengan mengikutsertakan Pemerintah Sudan dalam pusaran konflik. Masyarakat Darfur yang bergabung dalam kelompok pemberontak Darfur ini menilai bahwa Pemerintah Sudan telah melakukan diskriminasi dan marginalisasi etnis di kawasan tersebut. Pemerintah Sudan dituntut kurang membangun kawasan Darfur baik secara ekonomi, politik maupun sosial.

## **2. Konfrontasi**

Konfrontasi berwujud kekerasan mulai terjadi pada akhir tahun 1980-an antar etnis di Darfur. Pada awal tahun 1980-an terjadi kekeringan panjang yang menyebabkan ketidakseimbangan di Darfur. Hal ini menyebabkan kelompok milisi Arab yang mayoritas peternak mulai agresif mencari sumber air dan tanah subur untuk ternak mereka. Usaha tersebut memunculkan kekhawatiran petani Darfur yang mayoritas etnis Fur, Masalit dan Zaghawa. Di tahun yang sama terjadi perang antara Libya dan Chad yang mempengaruhi penyebaran ideologi supremasi Arab ke Darfur. Keterlibatan Libya juga mengakibatkan masuknya arus senjata kecil ke Darfur yang pada akhirnya menyebabkan tindak kekerasan. Pada pertengahan 1987 perang pecah antara etnis Fur dan nomaden Arab. Sebagai akibatnya suku-suku Afrika (Fur, Masalit, dan Zaghawa) ini membentuk kelompok perlawanan bersenjata di tahun 1990-an. Konfrontasi demi konfrontasi dengan intensitas negosiasi yang rendah membuat konflik ini menjadi laten, ditambah dengan minimnya perhatian pemerintah saat itu yang sedang menhadapi konflik di Sudan Selatan.

Intensitas konfrontasi di kawasan Darfur kian meningkat. Konfrontasi terjadi pada tahun 1993, antara etnis Fur dengan milisi bersenjata di wilayah pegunungan Nuba.<sup>76</sup> Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah Bashir yang membagi wilayah Darfur menjadi tiga bagian pada tahun 1994. Kebijakan tersebut dinilai makin menghimpit dan mengikis peran kepemimpinan tradisional yang telah ada di kawasan Darfur sejak dahulu kala, serta memunculkan pandangan bahwa pemerintah pusat berupaya memberikan keluasan bagi etnis Afrika Arab untuk mendapatkan kekuasaan.

Konfrontasi kembali terjadi pada tahun 1998-1999 ketika pemerintah Bashir melihat bahwa etnis Messeiria (*Black African*) di Darfur Barat terkait dengan kelompok pemberontak SPLA selatan.<sup>77</sup> Dalam konfrontasi tersebut pemerintah Sudan kembali memajemen konflik dengan memanfaatkan milisi bersenjata Arab. Karena dukungannya terhadap milisi Arab tersebut maka pada tahun 2001 mereka para pemberontak Dafur melancarkan serangan sporadis terhadap gedung-gedung kepolisian dan markas tentara.

### **3. Krisis**

Fase krisis mulai terjadi di Darfur ketika eskalasi konflik yang sebelumnya laten dan bersifat etnis berubah menjadi konflik bernuansa politik. Perubahan ini terjadi karena etnis-etnis yang merasa tertekan tersebut mulai terkonsolidasi dalam gerakan perlawanan yang lebih besar. Pada tahun 2002 ketiga suku ini



(Fur, Masalit, dan Zaghawa) memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontakan yaitu Pasukan Pembebasan Sudan atau *Sudanese Liberation Army* (SLA) atau *Jaisy Tahrir al-Sudan* dan Gerakan Keadilan Persamaan atau *Justice and Equality Movement* (JEM) atau *Jaisy Tahrir al-Sudan*. Dua kelompok ini memang memiliki kecenderungan bergerak dalam bidang politik dengan memuat isu-isu diskriminatif pembangunan pemerintah terhadap masyarakat etnis Afrika Hitam Darfur.

Serangan terhadap Bandar Udara El Fasher di Darfur Utara pada tanggal 26 Februari 2003 menjadi titik awal perang antara kelompok pemberontak Darfur dengan Pemerintah Sudan yang didukung oleh milisi Arab Janjaweed. Para pemberontak Darfur juga melakukan penyerangan terhadap markas pemerintah di kota Golo, menyerang pos-pos polisi dan konvoi-konvoi militer milik pemerintah di Pegunungan Marra. Pada 25 Maret 2003 markas militer milik pemerintah di kota Tine yang terletak di perbatasan Chad berhasil direbut.

Untuk melawan gerakan pemberontakan, Pemerintah Sudan menambah pasukan tentara dan mendukung penduduk lokal untuk membentuk suatu kelompok yang dikenal sebagai Janjaweed atau iblis berkuda. Anggotanya sebagian besar adalah orang-orang Afrika Arab yang mayoritas adalah peternak. Pemerintah yang mendukung Janjaweed menuduh penduduk Non-Arab (Afrika Hitam) melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan massal,

Cara yang sama juga digunakan pemerintah Bashir yaitu dengan mengerahkan milisi pro-pemerintah untuk melawan gerakan pemberontak Darfur. Adanya penggunaan milisi ini disinyalir oleh sejumlah kalangan bahwa pemerintah Bashir telah melakukan manajemen konflik ketika keadaannya tertekan karena pada saat itu konflik dengan pemberontak di Selatan juga belum berakhir.

#### 4. Akibat

Akibat dari perang antara pemberontak Sudan (SLA dan JEM) dengan milisi Janjaweed dan tentara Pemerintah Sudan banyak korban berjatuhan. Terkait kebijakan manajemen konflik yang dilakukan pemerintah Bashir atas konflik Darfur, PBB memperkirakan sekitar 300.000 orang tewas dan lebih dari 2,2 juta lainnya meninggalkan rumah mereka. Hal tersebut menimbulkan tuduhan telah terjadi masalah kemanusiaan seperti genosida yang dilontarkan beberapa masyarakat internasional atas konflik di Darfur tersebut.

Akibat konflik tersebut rakyat yang menjadi korban semakin menderita, karena terjadi penghancuran terhadap rumah-rumah penduduk, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan warga sipil. Akibatnya banyak rakyat yang meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman baik dalam wilayah Sudan maupun ke luar negeri.

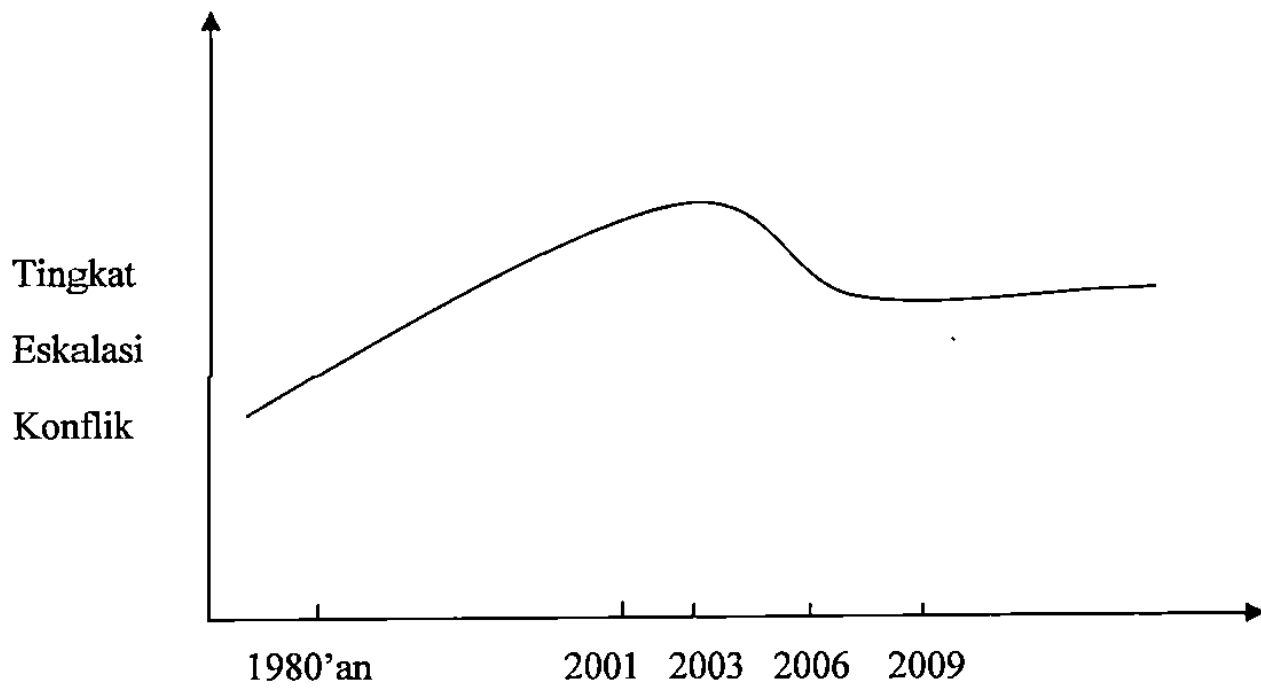
Kondisi ini memaksa komunitas regional maupun internasional ikut andil dalam penyelesaian konflik Darfur. Pada tahun 2004 Uni Afrika menggelar misi pemeliharaan perdamaian dengan nama AMIS (*African Mission In Sudan*)

Beberapa kali perundingan damai yang diselenggarakan selalu gagal mencapai kesepakatan damai. Barulah pada tanggal 5 Mei 2006 di Abuja, Nigeria diadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai, yang dinamakan *Darfur Peace Agreement* (DPA). Kesepakatan damai tersebut ditandatangani Pemerintah Sudan dengan SLA Minni Minawi, sedangkan JEM dan SLA Abdul Wahid menolak menandatangani. Hal tersebut menyebabkan situasi di Darfur mulai berkejolak kembali. Hingga akhirnya pada 2008 di tempatkan pasukan gabungan Uni Afrika dan PBB dengan nama UNAMID (*United Nations-African Union Mission In Darfur*) untuk memantau kawasan Darfur.

## **5. Pascakonflik**

Upaya perundingan damai terus diupayakan oleh mediasi Uni Afrika. Hingga muncul ketegangan kembali ketika pada 4 Maret 2009 dikeluarkan surat perintah penahanan Presiden Omar Hassan Bashir atas tuduhan kejahatan perang dan kemanusiaan di Darfur oleh Mahkamah Internasional (ICC). Perundingan damai antara kelompok pemberontak dan pemerintah Sudan menjadi tersendat dan mengalami beberapa kali penundaan hingga tahun 2010

**Gambar 1. Penahapan Konflik Darfur**



Sumber modifikasi: Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik : Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001) hal 20